

TENDENSI ANTIPLURALISME DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: KRITIK TEKS BUKU AJAR PAI SMU/SMK

Abdul Wahid

Abstrak

Materi buku PAI SMU/SMK memiliki karakteristik menonjol, antara lain: (a) orientasi yang kuat kepada pengembangan ranah kognitif; (b) penekanan kepada aspek intelektual diarahkan kepada pemahaman agama yang bersifat fiqhiyah atau syari'ah; (c) materi akidah banyak menonjolkan corak teologi skolastik yang cenderung apologis dan tertutup; (d) dalam berbagai topik, tergambar adanya wawasan pluralisme, tetapi itu lebih berorientasi ke dalam (pluralisme internal). Karenanya, tidak bisa dilakukan ikut sertanya klaim kebenaran mutlak yang dikandung oleh agama (Islam); dan (e) jika terdapat nuansa inklusivisme di dalamnya maka itu tidak lain adalah identifikasi dan pengakuan akan adanya persamaan-persamaan beberapa aspek agama. Namun, di balik itu tersirat universalisme yang kental dengan dominasi dan kooptasi.

Pengembangan wawasan keagamaan seperti itu pada taraf tertentu memiliki kaitan sangat erat dengan terbentuknya sikap-sikap keagamaan tertentu. Kecenderungan yang kuat kepada wawasan fiqh bisa melahirkan suatu pandangan keagamaan yang formalistik, melihat segala sesuatu secara hitam putih. Aspek-aspek material dan artifisial menjadi parameter untuk melihat, menilai, dan mengidentifikasi seseorang. Demikian juga jikalau wawasan keagamaan mencerminkan eksklusivisme dan klaim kebenaran yang kental, akan menghadirkan cara pandang dan sikap beragama yang menang sendiri, benar sendiri, dan mutlak-mutlakan. Jika kehidupan keagamaan didasari dengan cara pandang seperti itu, maka dalam berhubungan dengan orang lain atau pemeluk agama lain, yang lebih berpeluang untuk tampil adalah rasa curiga, a-priori, dan ketidak sediaan untuk berdialog atau berinteraksi.

Kata Kunci: Keragaman, Konflik, Fanatisme, Diskriminasi, Toleransi, Dialog, Rekonsiliasi, Hubungan Kemanusiaan.

DI Indonesia, pengakuan akan pluralisme agama dan potensi-potensi yang dikandungnya secara eksplisit telah berlangsung sejak tahun 1945 ketika para *founding fathers* merumuskan kemerdekaan dan mencari format kehidupan

berbangsa dan bernegara. Pengakuan itu diberikan dalam bentuk politis, struktural, dan kultural. Secara politis, keragaman agama diakui secara formal melalui rumusan Pancasila dan UUD 1945. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa” merupakan payung bagi hidup dan berkembangnya agama. Kehidupan agama dan kebebasan penduduk untuk memeluk agama secara lebih spesifik tertuang dalam UUD 1945 pasal 29: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,” (ayat 1) dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu,” (ayat 2). Pokok-pokok pikiran ini kemudian dijabarkan lagi melalui pembakuan agama-agama resmi di Indonesia yang meliputi lima agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Pembagian kepada lima agama resmi ini berdasarkan pertimbangan eksistensi dan perkembangan agama waktu itu yang didominasi oleh lima agama itu.

Secara struktural, pemerintah berperan sebagai agen utama ‘politisasi agama’ dengan menjadikan agama sebagai faktor pembangunan. Dengan posisinya yang begitu vital dalam konteks negara, agama lalu dilembagakan dengan melibatkannya ke dalam struktur-struktur politik. Departemen Agama didirikan terutama untuk menjadikan agama *inherent* dengan proses pembangunan. Demikian juga lembaga-lembaga tempat para pemimpin agama menyalurkan sumbangan mereka bagi pembangunan, seperti MUI, DGI, GKI, PHDI, WALUBI. Ormas-ormas keagamaan diposisikan sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari sub-sistem politik kenegaraan yang kesemuanya bermuara pada pemanfaatan dimensi agama bagi kepentingan negara.

Secara kultural, masyarakat memberikan respon yang khas, yakni berupa kecenderungan untuk selalu bersikap toleran dan terbuka – salah satu substansi nilai yang sudah melekat dalam kebudayaan Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) itu kemudian oleh kalangan cendekiawan diramu, direinterpretasi, direaktualisasi, dan dikontekstualisasi sebagai paradigma untuk menghadapi kenyataan dan tantangan yang menyertai suasana kehidupan pluralistik.

Pengembangan wawasan pluralisme agama ini sudah beranjak dari tahap sosialisasi dan pemahaman kepada tahap pencarian paradigma teologi dan formulasi dialog dan kerjasama antarumat beragama. Sosialisasi itu antara lain dilakukan melalui pendidikan, termasuk pendidikan agama yang berperan besar dalam pembentukan sikap keagamaan. Faktor pendidikan

dan pengajaran dalam pembentukan sikap keagamaan dan respon terhadap realitas keragaman, jelas sangat penting. Karena, sebagai proses sosial pendidikan dan pengajaran merupakan wahana bagi suatu agama untuk mentransmisikan ajaran-ajarannya. Dengan konsep dasar sebagai proses alih nilai (*transfer of values*) dan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), pendidikan berperan menanamkan nilai-nilai dan pengetahuan agama kepada pemeluknya.¹ Nilai-nilai dan pengetahuan keagamaan ini kemudian berpadu membentuk sikap dan perilaku keagamaan. Dengan demikian, kalau dalam proses pendidikan, agama diajarkan sebagai sesuatu yang eksklusif, maka *output*-nya adalah manusia yang bersikap eksklusif. Sebaliknya, kalau agama diajarkan sebagai sesuatu yang terbuka dan dengan cara yang demokratis, maka hasilnya adalah manusia-manusia yang terbuka dan bisa memahami keberadaan orang lain dengan keunikan-keunikan pribadi dan latar belakangnya.

Dengan pendidikan yang demikian, wajar kalau terjadi kekacauan dalam masyarakat, kekeliruan pelaksanaan pendidikan sehingga menjadi sekedar pengajaran, merupakan hal yang dianggap sebagai penyebabnya sehingga digugat. Dalam konteks kemusykilan hubungan sesama pemeluk agama, tentulah pendidikan agama yang menjadi sorotan. Dalam keadaan seperti ini pendidikan agama menghadapi problem sekaligus tantangan yang besar, meskipun hal ini sebenarnya merupakan problem dan tantangan pendidikan nasional, karena pendidikan agama merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Ketika masyarakat Indonesia dewasa ini mengalami berbagai macam krisis, seperti krisis politik, ekonomi, hukum, dan kebudayaan, orang melihatnya sebagai refleksi krisis pendidikan nasional, karena pendidikan merupakan bagian dari keseluruhan hidup manusia di dalam segala aspek sosial. Pendidikan nasional dilihat sebagai potret buram yang harus diperbaiki.²

Tulisan ini difokuskan pada substansi pendidikan agama, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagaimana termuat dalam buku teks. Yang hendak dilihat adalah munculnya nuansa ketidaksesuaian antara idealitas pendidikan Islam yang menghargai pluralitas dan pemahaman yang dikembangkan dalam buku teks.

¹Hujair AH. Sanaki dan Muslih Usa, "Moralitas Pendidikan dalam Transformasi Sosial." *Pendidikan Islam*. Vol. 4 Th. III (Maret, 1998).

²H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 1.

Buku teks yang menjadi objek analisis adalah buku *Pendidikan Agama Islam untuk Siswa SMU/SMK* (selanjutnya disebut buku PAI SMU) semua kelas (I, II, dan III) yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2000. Pilihan buku, tingkatan, kelas, dan penerbit ini didasarkan pada alasan-alasan praktis dan akademis. Secara praktis, karena keterbatasan dalam penulisan ini dan luasnya ruang lingkup pendidikan agama, maka tidak mungkin semua buku pendidikan agama atau buku yang terkait dengan wacana pluralisme dianalisis tanpa dibatasi pada kategori-kategori tertentu seperti di atas. Secara akademis, *pertama*, pemilihan buku PAI didasarkan pada suatu asumsi bahwa perilaku-perilaku keagamaan, baik yang berdimensi ketuhanan (vertikal) maupun yang berdimensi sosial-kemanusiaan (horizontal), selalu mempunyai kaitan dengan aspek kognisi agama. Aspek kognisi agama ini termuat secara sistematis dalam proses pendidikan, di mana pendidikan agama merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan di dalamnya dan buku teks merupakan instrumennya yang utama. *Kedua*, pemilihan subjek pendidikan agama Islam berdasarkan pada asumsi bahwa warna hubungan antaragama dalam masyarakat majemuk sangat ditentukan oleh konfigurasi mayoritas-minoritas, dan Islam adalah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam komposisi masyarakat plural, konflik bisa muncul jika mayoritas menunjukkan klaim-klaim dominasi, dan minoritas menunjukkan respon yang militan. *Ketiga*, pemilihan tingkatan SMU karena secara substansial materi-materi pengajaran yang terkait dengan wacana pluralisme agama banyak termuat dalam buku PAI SMU secara implisit maupun eksplisit. Di samping itu terkait juga dengan asumsi bahwa pada masa-masa pendidikan sekolah menengah inilah internalisasi agama banyak dilakukan. Kenyataan juga menunjukkan bahwa kekerasan dan konflik antar kelompok, termasuk antarpemeluk agama, banyak melibatkan secara langsung anak-anak usia sekolah SMU. *Keempat*, pemilihan buku terbitan Departemen Agama di samping karena buku itu merupakan buku teks pokok (buku wajib) bagi siswa, juga karena secara institusional Departemen Agama merupakan lembaga resmi pemerintah, maka produk akademis yang dilahirkannya dapat dikatakan sebagai tafsiran resmi pemerintah, sehingga tergambar bahwa wacana pluralisme yang termuat dalam buku PAI SMU itu adalah wacana dominan (*mainstream*) – dalam terma pascamodernisme: tafsiran tunggal – yang dikembangkan oleh negara ke dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, analisis ini juga

sekaligus merefleksikan adanya kepentingan ideologis-politis yang melekat di balik teks.

Karakteristik Materi Buku PAI SMU

Buku PAI SMU yang disusun sebagai bahan pembelajaran mata pelajaran Agama Islam bagi siswa sekolah menengah umum dan kejuruan ini disusun berdasarkan amanat kurikulum 1994. Sebagaimana diketahui, kurikulum 1994 dinilai lebih menekankan pengembangan aspek kognisi daripada aspek afektif dan psikomotorik.³ Dengan berpijak pada kurikulum yang menekankan segi intelektualitas, maka sudah barang tentu muatan buku ajar PAI juga lebih banyak berorientasi kepada pengembangan kompetensi kognitif daripada pengembangan kemampuan afektif dan psikomotorik. Hal ini bisa dilihat dari struktur isi buku yang mengabaikan aspek-aspek praktis dari agama, yang seharusnya masuk secara terpadu ke dalamnya. Aspek praktis dari agama tersebut misalnya latihan beribadah, simulasi interaksi sosial, latihan pemecahan masalah secara praktis, dan sebagainya

Buku PAI SMU ini disusun dengan pendekatan integratif, yaitu pemaduan di dalamnya semua mata pelajaran keislaman yang pokok seperti Aqidah, Akhlaq, Fiqh, Sejarah Islam, dan al-Qur'an.

Materi-materi yang menyangkut Aqidah terdapat delapan topik, yaitu: Dinul Islam, Iman kepada Allah, Iman kepada Malaikat, Iman kepada Kitab-kitab Allah, Iman kepada al-Qur'an, Iman kepada Rasul Allah, Nabi Muhammad Rasul Terakhir, Iman kepada Hari Akhir, dan Iman kepada Qadha dan Qadar.

Materi-materi Akhlak sepuluh topik, yaitu: Tanggung Jawab, Hal-hal yang Merusak Iman, Keadilan, Ikhlas, Kesetiakawanan, Syukur Nikmat, Disiplin, Berpikir Positif atau Qanâ'ah, Etos Kerja, serta Sikap dan Perilaku Orang Beriman.

Materi-materi yang berkaitan dengan Fiqh ada enam belas topik, antara lain: Sumber Hukum Islam, Shalat Berjama'ah, Macam-macam Sujud, Shalat Fardhu 'Ain dalam Berbagai Keadaan, Wakaf, Khutbah Jum'at, Riba dan Perbankan, Shalat Sunat, Dzikir dan Do'a, Penyelenggaraan Jenazah,

³Muslih Usa, "Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta: Suatu Pengantar," dalam Muslih Usa (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 11.

Kedudukan dan Hikmah Shalat, Munâkahat, Zakat dan Pajak, Mawâris, Haji dan Umrah, serta Perseroan (Syirkah).

Materi-materi Sejarah Islam lebih kurang enam topik, antara lain: Islam di Indonesia, Peranan Umat Islam di Indonesia, Islam di Asia, dan Islam di Beberapa Benua. Di samping itu, termasuk dalam materi sejarah ini adalah sejarah personal, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW Rasul Terakhir, juga tentang sejarah peradaban Islam, yaitu Peradaban Islam dan Ilmu Pengetahuan.

Materi-materi al-Qur'an sebanyak lima belas topik, antara lain tentang: Tiga Lapis Kegelapan dalam Raḥim [Qs. al-Zumar (39): 6], Kesempurnaan Menyusukan Anak [Qs. al-Baqârah (2): 233], Makanan yang Halal dan Bergizi [Qs. al-Baqârah (2): 168], Pelestarian Alam [Qs. al-'An 'âm (6): 141], Kerusakan Alam Akibat Tangan Manusia [Qs. al-Rûm (30): 41], Pemerataan [Qs. al-Baqârah (2): 267], Pemerataan dan Tidak Boros [Qs. al-Isrâ' (17): 26 dan 27], Kemurnian al-Qur'an [Qs. Yûnus (10): 37 dan 38], Kebenaran al-Qur'an [Qs. al-Mâ'idah (5): 48], Rahmat Allah berupa Bumi, Laut, dan Langit [Qs. al-Jâtsiyah (45): 12 dan 13], Azas Keseimbangan [Qs. al-Qashash (28): 76 dan 77], Ilmu Pengetahuan dan Teknologi [Qs. al-Raḥmân (55): 33], Asal Kejadian Manusia [Qs. al-Mu'minûn (23): 12-14], Air dan Susu Binatang Ternak [Qs. al-Naḥl (16): 65 dan 66], dan Buah-buahan dan Madu [Qs. al-Naḥl (16): 67-69].

Di samping materi-materi itu, terdapat juga materi-materi yang agak sulit dipetakan ke dalam ranah-ranah mata pelajaran pokok tersebut. Materi-materi yang disebut terakhir ini dapat digolongkan sebagai materi pengembangan yang menyangkut wawasan atau etika sosial Islam, misalnya mengenai: Musyawarah dalam Islam, Perdamaian atau Islah, Kerukunan Umat Beragama, dan Penyakit Masyarakat.

Komposisi di atas menggambarkan penyebaran materi tidak merata antara aspek-aspek mata pelajaran Agama Islam yang ada. Dominasi fiqh tampaknya sangat kuat (dengan 16 topik), sehingga dapat dikatakan buku teks PAI SMU cenderung berorientasi fiqh (*fiqh-oriented* atau *fiqh-minded*). Sementara itu, dari materi-materi al-Qur'an yang juga dominan, tampak nuansa apologetik sangat kuat. Ini bisa dilihat melalui tampilnya ayat-ayat yang menegaskan bahwa secara normatif al-Qur'an atau Islam memiliki ajaran-ajaran yang *kaffah*, mendalam, ilmiah, dan ekologis. Munculnya ayat-ayat ini merupakan cermin dari kentalnya nuansa tauhid atau akidah dalam pendidikan agama Islam, dan ini mengandung peluang munculnya klaim

kebenaran. Pemunculan ayat-ayat seperti itu harus diimbangi dengan pemberian pemahaman yang lebih jelas tentang realitas implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meminjam istilah Nata⁴ dan Mulkhan⁵, harus disertai dengan pendekatan sosiologis-empiris yang terjadi dalam masyarakat muslim. Dan itu tidak ditemukan.

Dengan gambaran seperti itu, dapat dikatakan buku PAI menggunakan pendekatan teologis-normatif dalam pembelajaran agama Islam. Menurut Waldman,⁶ dengan menggunakan pendekatan teologis dalam memahami agama, di satu sisi akan memberikan keuntungan bagi kebanyakan orang yang menginginkan pemahaman agama yang memadai dan kepastian dalam beragama, dibanding dengan pendekatan yang lain, misalnya pendekatan sosiologis atau humanis. Namun demikian, di sisi lain, pendekatan teologis cenderung memberi stimulasi bagi munculnya cara berpikir yang monolitik, eksklusif, dan apologetik, apalagi ayat-ayat yang ditampilkan adalah ayat-ayat yang bernuansa apologi. Cara pandang apologetik yang bisa muncul dengan ditampilkannya ayat-ayat apologi, bisa mempertebal semangat komitmen keagamaan. Di satu sisi, munculnya komitmen keagamaan yang kuat adalah sesuatu yang positif bagi perkembangan keberagaman karena bisa menumbuhkan atau meningkatkan mutu keimanan. Tetapi di sisi lain, bisa mempertebal semangat fanatisme dalam beragama. Sama seperti cara pandang formalistik, cara pandang apologetik juga melahirkan keberagaman yang kurang produktif, karena orang yang bercara pandang seperti itu cenderung tidak peka terhadap perkembangan atau kecenderungan lain suatu realitas. Karena kurang peka, maka sulit bagi mereka berdialektika dengan kehidupan sehingga di dalam keseharian ajaran agama yang tadinya ideal dan baik di tangan mereka menjadi tidak berdaya dalam melakukan transformasi. Agama menjadi sedemikian abstrak. Dalam keadaan demikian keberagaman justru bisa kontra-produktif, karena akan mudah digerakkan oleh kepentingan-kepentingan terutama kepentingan politik. Politisasi agama seperti inilah yang merupakan salah satu sumber konflik-konflik sosial-keagamaan selama ini.

⁴Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 28.

⁵Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritual Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 56.

⁶Marilyn R. Waldman, "Primitive Mind/Modern Mind: New Approaches on Old Problem Applied to Islam," dalam Richard C. Martin (ed.), *Approaches to Islam in Religious Studies* (Arizona: The University of Arizona Press, 1985), 91.

Dengan nalar seperti itu, implementasi pendidikan agama Islam, jikalau dilihat dari segi materi yang termuat dalam PAI SMU, belum sepenuhnya mencerminkan visi pluralisme bangsa Indonesia yang sudah ada sejak lama. Dalam banyak hal juga belum sepenuhnya mencerminkan semangat pluralisme yang berkembang pada masyarakat muslim awal.

Wacana Pluralisme dalam Buku PAI SMU

Wacana pluralisme agama memuat beberapa konsep mendasar dalam diskursus keagamaan, seperti masalah klaim kebenaran (*truth claim*) yang mencakup klaim finalitas, kesempurnaan, keselamatan, dan keaslian agama; konflik, dialog, dan rekonsiliasi antarpemeluk agama; wawasan sejarah agama (termasuk sejarah personal pemimpin agama); solidaritas sosial dan toleransi; serta pengembangan hubungan kemanusiaan yang mengarah kepada keselarasan dan keharmonisan. Dalam buku PAI SMU, wacana-wacana itu termuat baik secara khusus melalui topik-topik yang menyangkut masalah itu maupun secara umum yang terintegrasi ke dalam berbagai topik.

Secara khusus, muatan wacana pluralisme tertera dalam buku PAI SMU Kelas II bab XVI “Kerukunan Umat Beragama” yang terdiri dari kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Secara umum, nuansa wacana pluralisme bisa ditemukan dalam bab-bab mengenai Dinul Islam, Tanggung Jawab, Keadilan (PAI SMU I), Hubungan Manusia dengan Manusia, Fungsi Iman kepada Kitab Allah kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Kesetiakawanan Sosial, Iman kepada Rasul Allah, Nabi Muhammad Rasul Terakhir, Perdamaian (*Islāh*) (PAI SMU II), Disiplin dalam Bermasyarakat, Disiplin dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, dan Berbuat Baik kepada Sesama Manusia (PAI SMU III). Wacana pluralisme juga tergambar dalam pemahaman terhadap beberapa ayat al-Qur’an seperti Surat Yûnus (10): 37-38 tentang kemurnian al-Qur’an dan Surat al-Mâ’idah (5): 48 tentang kebenaran al-Qur’an (PAI SMU II).

Wacana-wacana pluralisme yang tergambar dalam buku teks PAI SMU, jika dipetakan akan mencakup dimensi doktrin, dimensi praksis, dan dimensi historis. Dimensi doktrin, atau bisa juga disebut dimensi paradigmatis, dalam tulisan ini adalah pemahaman-pemahaman yang mendasar tentang aspek-aspek normatif dari agama, seperti rukun iman, rukun Islam, serta pengertian-pengertian definitif tentang agama dan aspek-aspeknya.

Dimensi praksis adalah ajaran-ajaran keseharian yang menggambarkan bagaimana seseorang bersikap dalam kehidupan sosial. Ajaran ini diderivasi dari inti ajaran-ajaran normatif agama. Yang termasuk dalam dimensi ini antara lain: tanggung jawab, disiplin, musyawarah, dan kesetiakawanan.

Sementara itu, dimensi historis, adalah pengungkapan aspek-aspek sejarah, muncul, berkembang, dan kiprah agama dalam masyarakat. Yang termasuk dalam aspek ini ialah sejarah Islam secara umum maupun sejarah Islam dalam konteks kewilayahan atau kawasan. Sejarah personal tokoh-tokoh agama, seperti sejarah hidup Nabi Muhammad, juga dapat dikategorikan dalam dimensi historis ini.

Berikut ini konsep-konsep penting temuan yang erat kaitannya dengan wacana pluralisme:

Eksklusivisme. Salah satu persoalan pokok dalam interaksi pemeluk agama adalah fenomena klaim kebenaran (*truth claim*) yang dikandung agama dan dipegang teguh oleh penganutnya. Klaim kebenaran yang dianggap sebagai akar konflik baik intern maupun antaragama.⁷ Termasuk dalam klaim kebenaran adalah klaim orisinalitas, finalitas, universalitas, dan keselamatan. Dalam klaim-klaim ini, pemeluk suatu agama menempatkan agamanya sebagai agama terakhir yang benar-benar dari Tuhan, universal, dan karenanya lebih sempurna dari yang lain dan lebih memberi jaminan keselamatan. Dengan pandangan seperti ini, pemeluk agama beranggapan agamanyalah yang harus dipeluk oleh semua orang jika menghendaki keselamatan. Kepemilikan yang teguh terhadap klaim-klaim ini membuat pemeluk agama menempatkan dirinya dalam posisi eksklusif. Kalaupun terdapat sikap inklusif di dalamnya, itu dalam arti agama lain harus larut dalam klaim agamanya. Bagi pemeluk suatu agama, klaim ini tentu saja positif, karena di situlah letak fungsi agama sebagai pemberi kepastian. Tetapi dalam relasi dan pergaulan antarpemeluk agama, klaim ini dianggap lebih banyak mengandung potensi benturan bahkan permusuhan yang berujung malapetaka kemanusiaan, jika berpegangan kepadanya dilakukan secara kaku, tanpa mau menziarahi kebenaran yang dimiliki orang lain.

Dalam buku PAI SMU, sejak awal klaim-klaim seperti di atas muncul terutama ketika memberi pengertian agama Islam.

⁷Ma'arif Jamuin, *Manual Advokasi Resolusi Konflik Antar-Etnik dan Agama* (Surakarta: Ciscore, 1999), 1.

Dinul Islam berarti agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya Muhammad SAW untuk disampaikan kepada segenap umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁸

Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT membawa 'Dinul Islam' berupa wahyu Allah yaitu Al-Qur'an, menjadi petunjuk bagi segenap manusia dalam beriman kepada Allah, dan menjadi rahmat dalam urusan-urusan dunia dan akhirat.⁹

Konsep Islam sebagai agama Tauhid adalah ajaran sepanjang sejarah manusia dari tiap-tiap nabi dan rasul, mulai Nabi Adam AS, sampai dengan Nabi Muhammad SAW.¹⁰

Dinul Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Umat terdahulu, masing-masing telah diutus seorang rasul, selanjutnya Allah mengutus seorang rasul terakhir bagi seluruh umat manusia yaitu Nabi Muhammad SAW.¹¹

Dalam pengertian-pengertian itu, Islam adalah agama yang mengandung kesejahteraan dan keselamatan (*salvation*). Islam juga adalah agama tauhid, agama universal, agama pamungkas, dan agama yang paling sempurna. Sifat-sifat demikian dilekatkan kepada Islam karena Islam datang dari Allah dan dibawa oleh semua nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Karena sifat-sifat itu, Islam harus didakwahkan untuk dipeluk oleh seluruh umat manusia, jika manusia menghendaki keselamatan.

Pengertian Islam seperti di atas terutama didasarkan pada penafsiran al-Qur'an surat Âli 'Imrân (3) ayat 19: "*Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam*"; dan surat al-Shaf (61) ayat 9: "*Dialah yang mengutus Rasuhnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik benci.*"

Pemakaian kalimat "bagi segenap manusia" atau "bagi seluruh manusia" dalam definisi-definisi di atas, di satu sisi mencerminkan klaim bahwa Islam adalah universal yang mempunyai misi inklusi, yaitu menyerap dan merangkul orang lain untuk masuk ke dalam pelukannya. Di sisi lain, terdapat kecenderungan untuk mengabaikan sejarah agama-agama yang telah berlangsung sekian lama yang telah membentuk karakter dan bentuk agama yang berbeda sama lain.

Klaim kebenaran dan universalitas suatu agama terkadang diikuti dengan mengidentifikasi orang lain salah. Model klaim seperti ini tampak misalnya

⁸PAI SMU I, 1.

⁹*Ibid.*, 3.

¹⁰*Ibid.*, 4.

¹¹*Ibid.*, 5.

ketika menjelaskan kedudukan al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang mengandung kebenaran mengenai apa saja di dalamnya yang berkaitan dengan hukum, akidah, kisah-kisah, dan segala aspek yang ada. Kitab-kitab lain yang turun sebelumnya adalah kitab yang sudah penuh dengan kekeliruan dan kesalahan, karena itu al-Qur'an tampil sebagai pengoreksi dan pembenar kitab-kitab terdahulu itu.

Hukum dari al-Qur'an ini bukan hanya berlaku untuk umat Islam, tetapi juga untuk umat lain yang bukan beragama Islam. Setelah turun kitab suci al-Qur'an, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu yang sudah diubah-ubah sudah tidak berlaku lagi. Kecenderungan mereka yaitu orang-orang yang bukan beragama Islam mengikuti hawa nafsu mereka jika mereka mempunyai masalah, mereka putus dengan hukum yang terdapat dalam kitab mereka. Padahal kitab mereka sudah tidak asli lagi.¹²

Dalam kerangka pemikiran pluralisme, definisi di atas jelas memperlihatkan klaim kebenaran dalam agama. Dalam klaim itu, terkandung muatan eksklusivisme, yaitu identifikasi diri berbeda dengan yang lain dalam hal kebenaran di sisi Tuhan. Pandangan eksklusivisme kalau diimplementasikan sangat membuka peluang bagi munculnya konflik antaragama. Karena itu kaum pluralis menganjurkan terjadinya penafsiran alternatif terhadap konsep-konsep agama, juga terhadap ayat-ayat yang menjadi landasan definisi Islam, sehingga pada gilirannya melahirkan pengertian Islam yang terbuka, yaitu Islam yang menghargai dan bisa berinteraksi dengan pihak lain. Salah satu contoh penafsiran itu adalah seperti yang diperlihatkan oleh Frithjof Schuon.¹³ Dengan pendekatan perennial, Schuon melihat semua agama pada tataran esoteris (batin) mengandung nilai-nilai keabadian (universal) yang sama. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki agama terjadi pada tataran eksoteris (lahir) ketika agama-agama terlibat dalam intensitas sejarah. Jika agama didekati dari sisi eksoterisnya, maka yang dilihat adalah perbedaan-perbedaan, tetapi jika ditilik dari sisi esoterisnya, akan terdapat titik temu (*kalimatun sawa*) agama-agama.

Inklusivisme. Inklusivisme adalah pemikiran atau sikap yang memandang bahwa kebenaran yang dianut oleh suatu agama adalah juga dianut oleh agama lain. Dengan demikian, inklusivisme sangat erat kaitannya

¹²*Ibid.*, II, 67.

¹³Lengkapnya lihat Frithjof Schuon, *Mencari Titik Temu Agama-agama*, ter. Safroedin Bahar (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987).

dengan pandangan keagamaan kaum universalis, yaitu mereka yang memandang bahwa dalam agama terdapat nilai-nilai universal yang bisa diakui dan dianut oleh siapa saja dari pemeluk agama mana saja. Dalam pemikiran ini terdapat titik temu antara agama-agama yang ada dalam aspek-aspek tertentu dari ajarannya, terutama ajaran prinsipil atau esoteris (substansi). Akan tetapi di balik kesamaan dan titik temu itu, di dalam pemikiran inklusivisme terdapat suatu klaim bahwa nilai dan ajaran agama sendiri-lah yang paling unggul dan paling sempurna, sehingga agama itu mempunyai daya cakup terhadap agama-agama lain.

Nuansa inklusivisme ini termuat dalam buku teks PAI SMU dalam beberapa topik. Dalam topik “Iman kepada Rasul-rasul Allah” misalnya dikatakan, semua rasul adalah utusan Allah, yang membawa risalah yang sama yaitu *tauhid*, mengesakan Allah, monoteisme. Karena itu Islam tidak membedakan rasul-rasul Allah yang banyak itu, karena mereka semua sebenarnya mempunyai tugas yang sama, yaitu:

- (a) Menyatukan itikad dan keyakinan umatnya yaitu bahwa Allah adalah Zat Yang Maha Kuasa.
- (b) Memberi batas bagi umatnya mana hal-hal yang dilarang dan mana yang harus dikerjakan menurut perintah Allah SWT.
- (c) Memberikan pedoman kepada umatnya agar mereka menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama seperti berlaku benar, terpercaya, menepati janji, sopan kepada sesama, santun kepada yang lemah dan sebagainya.
- (d) Menjelaskan kepada umatnya apa saja yang dapat membawa mereka kepada keridhaan Allah, dan apa saja yang dapat membawa mereka kepada kemurkaannya.
- (e) Mengajarkan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan Allah SWT.¹⁴

Dalam tugas-tugas ini, semua rasul yang ada tidak memiliki perbedaan. Namun di antara para rasul itu ada yang mempunyai kelebihan dibanding yang lain berupa keteguhan dan ketabahan hati yang sangat tinggi, sehingga mereka dijuluki “Ulul Azmi,” yang mempunyai keagungan. Mereka adalah Nabi Nûḥ, Nabi Ibrâhîm, Nabi Mûsâ, Nabi Îsâ, dan Nabi Muḥammad.

Di antara para rasul Ulul Azmi yang paling tinggi martabatnya adalah nabi Muhammad SAW, karena kalau nabi-nabi yang lain diutus hanya untuk umatnya, sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan untuk seluruh umat manusia serta menyempurnakan syari’at nabi-nabi terdahulu.¹⁵

¹⁴PAI SMU, II, 156.

¹⁵*Ibid.*, 157.

Dalam topik lain, nuansa inklusivisme ini tergambar dengan jelas ketika menerangkan keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Sebagai manusia biasa, Nabi Muhammad pada dasarnya tidak berbeda dengan manusia lain atau nabi-nabi lain. Namun, Allah telah memberikan anugerah kepadanya berupa kemuliaan dan kedudukan yang sangat tinggi dibandingkan dengan manusia lain atau dengan nabi-nabi lain. Kemuliaannya dapat dibuktikan dengan ketinggian akhlak dan jasa-jasanya yang telah berhasil mengangkat martabat manusia dari kehidupan yang kacau-balau menjadi kehidupan yang aman, tenteram dan damai.

Kelebihan Nabi Muhammad SAW jika dibandingkan dengan nabi dan rasul lain di antaranya dapat disebutkan sebagai berikut: (a) Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT sebagai nabi dan rasul penutup, berarti setelah beliau tidak ada lagi nabi atau rasul. Jika setelah kerasulan beliau ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, orang itu pembohong...; (b) Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT untuk seluruh manusia di dunia ini, sedangkan nabi dan rasul-rasul lain hanya diutus untuk golongan atau bangsanya saja...; (c) Sebagai nabi penutup, beliau telah menceritakan sejarah perjuangan para nabi terdahulu dengan kitab dan mukjizatnya masing-masing. Selain sejarah perjuangan para nabi, juga kisah orang-orang penting terdahulu seperti Luqman, Imran dan Zulkarnain. Semua kisah-kisah itu tercantum di dalam al-Qur'an dan merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. (d) Sebagai nabi penutup, maka syari'at yang dibawanya merupakan kesimpulan dari syari'at yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Syari'at yang dibawa oleh nabi penutup lebih lengkap, lebih sempurna dan selalu sesuai dengan keadaan tempat dan waktu, serta dapat mengikuti perkembangan zaman.¹⁶

Di balik wawasan tentang nabi dan rasul di atas, terdapat kecenderungan untuk melakukan stratifikasi kenabian berdasarkan kiprah sejarah para nabi. Di puncak strata para nabi itu, bertengger Nabi Muhammad bersama label-label keagungannya. Hal ini memberi rasa percaya diri kepada para pengikut Nabi Muhammad untuk membangun komitmen keagamaan yang kokoh. Namun, dengan hal ini pula, tidak tertutup kemungkinan lahirnya perasaan lebih tinggi dari yang lain yang hinggap dalam diri pengikut Nabi Muhammad. Dengan kedudukan yang sedemikian tinggi itu, maka sudah sewajarnya Islam yang dibawanya menaungi agama-agama lain.

Wawasan Pluralitas. Sebenarnya di balik klaim-klaim keagamaan seperti di atas, dalam buku PAI SMU terdapat ungkapan-ungkapan yang secara kental memuat nuansa kesadaran akan pluralitas manusia.

¹⁶*Ibid.*, 175-6.

Sebenarnya hampir seluruh manusia mengakui adanya Tuhan yang menjadikan alam ini. Akan tetapi mereka berbeda dalam menetapkan Tuhan yang diimani, sebagian mempertuhankan matahari, sebagian lagi api, roh-roh, dan sebagainya.¹⁷

Dalam pernyataan di atas terdapat kesadaran bahwa manusia meskipun berbeda dalam mengidentifikasi Tuhan, namun terdapat hubungan konvergen (titik temu) di antara perbedaan-perbedaan itu, yaitu pengakuan manusia akan adanya sang Khaliq (pencipta). Pengakuan ini terpatri dalam jiwa manusia sehingga membentuk apa yang dikenal sebagai religiusitas atau rasa keberagamaan. Dengan kata lain, manusia di dalam perbedaannya memiliki kesamaan dalam kecenderungan mengakui hal-hal yang bersifat transendental, yang kuasa di luar dirinya, terlepas dari apa penamaan mereka akan objek suci yang disadarinya itu. Adapun perbedaan penamaan itu sangat ditentukan oleh latar belakang kehidupan, budaya, serta bahasa yang dipergunakan.

Dalam alinea lain dikatakan bahwa umat manusia diberi syari'at yang berbeda-beda, meskipun pokok-pokoknya sama berinti kepada tauhid.

Setiap umat itu oleh Allah SWT diberinya syari'at yang berbeda-beda. Dengan demikian syari'at yang dibawa oleh Nabi Nuh berbeda dengan syari'at yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Perbedaan syari'at antara seseorang nabi dengan nabi yang lain disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan umatnya masing-masing. Walaupun syari'at yang dibawa oleh para nabi terdahulu berbeda-beda, tetapi dasar pokok setiap syari'at yang dibawa para nabi adalah sama yaitu ajaran tauhid.¹⁸

Pernyataan di atas mencerminkan kesadaran historis dalam memandang fenomena agama. Hal ini merupakan cara pandang kaum perennialis dan juga kaum pluralis. Akan tetapi pemikiran dalam alinea yang mencerminkan wawasan pluralitas di atas menjadi tidak konsisten karena dinetralisir oleh alinea berikutnya yang kembali menegaskan klaim-klaim kebenaran tunggal dalam agama.

Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW membawa risalah Dinul Islam dengan tujuan memurnikan tauhid, yaitu mempercayai dan meyakini bahwa hanya terdapat satu Tuhan (monotheisme) yang wajib disembah, tempat mohon petunjuk dan pertolongan. Tuhan itu adalah Dzat Yang Maha Luhur, sumber dari segala kebaikan dan kebenaran. Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Yang Maha Adil dan Maha Suci. Tuhan itu bernama Allah (Subhanahu Wata'ala Maha Suci lagi Maha

¹⁷*Ibid.*, I, 3.

¹⁸*Ibid.*, II, 67.

Tinggi) dia hidup dan berdiri sendiri, tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Kepunyaannya segala apa yang ada di alam raya ini.¹⁹

Secara substansial, pernyataan di atas tidak ada yang salah karena memang seperti itu adanya. Hanya saja penyampaiannya tidak akan menjadi sia-sia jika tidak ditempatkan setelah alinea sebelumnya yang sarat dengan nuansa pluralisme.

Di samping netralisasi wawasan pluralisme agama, dalam buku teks PAI SMU juga terdapat reduksi atau penyempitan terhadap ruang lingkup pluralisme dengan mengklasifikasi kelompok manusia ke dalam kategori-kategori sosial, politik, fisiologis, dan gender. Di sini agama tampaknya tidak merupakan bagian dari aspek keragaman yang harus berinteraksi dan berhubungan satu sama lain secara harmonis dan mutualistik.

Manusia diciptakan oleh Allah terdiri atas laki-laki dan perempuan. Mereka hidup berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa dan bernegara. Mereka saling membutuhkan dan saling mengasahi, sehingga manusia juga disebut makhluk sosial. Orang tidak dapat hidup, apalagi bahagia, jika tidak berhubungan dengan orang lain. Keanekaragaman jenis dan status sosial justru mendorong manusia untuk saling memerlukan dan saling menghormati. Demikian pula keragaman daerah asal, antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, bahkan antara satu negara dengan negara lain, juga mendorong saling kerjasama.

Tidak pada tempatnya andaikata di antara mereka saling membanggakan dan menyombongkan diri. Sebab kelebihan suatu kaum bukan terletak pada kekuatannya, kedudukan sosialnya, warna kulitnya, bukan pula terletak pada ketampanan, kecantikan ataupun jenis kelaminnya.²⁰

Dalam alinea ini jelas wawasan pluralismenya kental dengan menyadari beragamnya manusia ciptaan Allah, akan tetapi pluralisme yang dimaksud lagi-lagi adalah pluralisme internal karena kategori yang digunakan adalah kategori bangsa, negara, kelompok, status sosial, warna kulit, dan gender, sementara kategori agama tidak digunakan. Dengan demikian, pluralisme agama tidak benar-benar menjadi kesadaran yang hendak dibangun dalam buku ini.

Toleransi. Dalam pemahaman yang umum, toleransi adalah sikap lunak, membiarkan dan memberi keleluasaan kepada para penganut agama lain. Dalam hubungan antaragama, toleransi dapat berupa toleransi ajaran atau

¹⁹*Ibid.*, I, 3.

²⁰*Ibid.*, 8.

toleransi dogmatis, dan toleransi bukan ajaran atau toleransi praktis.²¹ Dengan toleransi dogmatis para penganut agama tidak menonjolkan keunggulan ajaran agama masing-masing. Dengan toleransi praktis para penganut agama saling membiarkan dalam mengungkapkan isi iman dan ajaran mereka dalam ibadah dan praktik keagamaan lain, dan mengamalkannya dalam kehidupan sosial. Kedua macam toleransi ini dapat bergabung atau terpisah, dalam arti para penganut agama dapat saling toleran dalam kedua hal itu, dan dapat pula bertentangan dalam satu hal, misalnya ajaran, tetapi membiarkan praktiknya dan sebaliknya. Dengan sikap toleran penganut agama dapat hidup berdampingan secara damai.

Dalam kaitan dengan ini, buku PAI SMU mengajarkan tentang prinsip dasar hubungan manusia bahwa manusia dengan sesamanya saling bekerja sama dalam kebaikan, dan bukan dalam kejahatan. Dengan prinsip dasar ini, kerjasama atau tolong-menolong dapat terjadi antarsesama individu, antarsesama masyarakat atau antara individu dan masyarakat.

Bagi orang yang hidupnya senantiasa berpegang teguh pada petunjuk Allah, maka beradaptasi dengan kehidupan masyarakat tidaklah sulit. Karena di dalam petunjuk-petunjuk Allah yang telah dituangkan dalam Al-Qur'an tersebut telah ada perintah yang mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang baik terhadap masyarakat. Misalnya dorongan untuk saling menghormati dan berbuat baik terhadap tetangga, dorongan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh penguasa atau ulil amri, dorongan untuk bersikap toleransi terhadap sesama manusia dan sebagainya. Dengan kata lain iman kepada kitab Allah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berfungsi sebagai motivator, dinamisator, dan stabilisator sehingga hubungan dengan sesama manusia baik perorangan maupun kelompok akan terjalin secara selaras, serasi dan seimbang.²²

Alinea ini menjelaskan bahwa dalam Islam terdapat prinsip-prinsip dasar atau petunjuk mengenai hubungan baik antarsesama manusia. Apa bentuk konkret petunjuk itu dan bagaimana mentransformasikannya dalam kehidupan nyata? Tentang ini buku PAI SMU tidak memberi penjelasan lebih lanjut sehingga bagaimana bentuk toleransi yang dihendaki Islam tidak kelihatan. Namun demikian, dapat ditangkap bahwa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip dasar hubungan antarsesama manusia adalah melakukan karya sosial yang baik dan berguna bagi orang banyak, lingkungan, dan masyarakat. Dalam bahasa al-Qur'an disebut "*fastabiq al-*khayrât**" [Qs.al-

²¹AM. Hardjana, *Penghayatan Agama: Yang Otentik dan Tidak Otentik* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 115.

²²PAI SMU, II, 10.

Baqârah (2): 148]. Prinsip *fastabiq al-khairât* ini, menurut Issa J. Boullata,²³ adalah doktrin penting dalam Islam mengenai hubungan antariman. Manusia boleh berbeda, karena memang Allah menghendaki perbedaan itu [Qs.al-Mâ'idah (5): 48; Qs. Hûd (11): 118; Qs. al-Nahl (16): 93; Qs. al-Syûrâ (42): 8; tetapi dalam perbedaan itu harus ada kerjasama dan berlomba-lomba dalam kebaikan.

Dialog. Dalam dialog para penganut agama yang berbeda bertemu dan mengadakan pembahasan untuk mencari pengertian dan pemahaman. Tujuannya adalah mencari kebenaran universal yang ada dalam agama masing-masing. Landasannya adalah saling menghargai dan bersedia untuk belajar. Dengan dialog para penganut agama saling memperdalam pemahaman tentang kebenaran, memperkaya ibadahnya, dan memperteguh pengamalan agamanya, tanpa merugikan keyakinan agama yang dianut. Hasil dialog adalah hubungan yang erat, sikap saling memahami, saling menghargai, saling percaya dan saling membantu dalam penghayatan agama. Mengikuti al-Faruqi,²⁴ dialog bertujuan menciptakan kemungkinan terjadinya berpindah (*conversion*) kepada kebenaran, atau memungkinkan munculnya pemahaman terhadap nilai atau perangkat makna yang dikandung masing-masing agama. Dengan demikian, dialog menjadi medium pertemuan antara pendekatan dan penyembahan Tuhan yang berbeda.

Di dalam materi pengajaran PAI SMU tidak terdapat pembahasan yang khusus tentang dialog, meskipun terdapat wawasan yang mengandung nuansa dialog. Wawasan yang dimaksud termuat dalam topik mengenai musyawarah dalam Islam. Didefinisikan bahwa musyawarah adalah berunding antara seorang dengan orang lain atau sekelompok dengan kelompok lain dengan dilandasi saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain untuk mencari dan mencapai keputusan yang lebih baik secara mufakat. Musyawarah harus dilandasi dengan prinsip persamaan hak dan kewajiban serta ketulusan hati semua yang terlibat supaya dihasilkan keputusan yang dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

²³Issa J. Boullata, "Fa-stabiq l-khayrat: A Qur'anic Principle of Interfaith Relations," dalam Yvonne Y. Haddad dan Wadi Z. Haddad (eds.), *Christian-Muslim Encounters* (Gainesville: University Press of Florida, 1995).

²⁴Ismail Raji al-Faruqi, *Islam and Other Faiths* (Herndon: The Islamic Foundation, 1998), 241.

Musyawarah atau dialog, adalah praksis yang harus dilakukan dalam suasana keragaman dan perbedaan, sehingga memungkinkan perbedaan itu berfungsi positif. Untuk menjustifikasi hal ini, dikatakan:

Manusia tidak bisa hidup sendiri, dalam hidup bermasyarakat dia memerlukan orang lain. Hidup masyarakat terjadi dari berbagai macam orang yang mempunyai tabiat dan sifat yang berbeda-beda, kadang-kadang rukun, tenteram dan baik, dan kadang-kadang sebaliknya. Dalam menghadapi perbedaan kehendak dan pendapat para anggota masyarakat itulah perlu dilakukan musyawarah, yakni merundingkan bersama-sama mencari titik temu dan mencari nilai yang lebih baik dengan penuh keikhlasan dan saling menghormati.²⁵

Secara konseptual, wawasan di atas dapat melandasi dialog baik internal maupun eksternal pemeluk agama. Tetapi, dalam ilustrasinya tergambar bahwa musyawarah dimaksudkan sebagai musyawarah internal suatu umat, dalam hal ini umat Islam, dalam menghadapi persoalan mereka. Dalam ilustrasinya digambarkan contoh musyawarah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya ketika menghadapi pilihan strategi yang tepat dalam Perang Badar melawan kaum kafir Quraisy. Ketika itu Rasulullah memilih tempat bertahan di dekat sumur air, berdasarkan perhitungannya sendiri (bukan petunjuk wahyu Allah). Sahabat berpendapat bahwa tempat itu kurang tepat dan menyarankan supaya menempati sumur air dekat pertahanan musuh sehingga memudahkan pasukan muslim menguras air sumur itu dan memindahkannya ke kubangan yang digali di belakang pertahanan musuh, dengan demikian musuh akan kehabisan air dan mudah dikalahkan. Saran ini diterima baik oleh Rasulullah dan dilaksanakan sehingga pasukan muslim memperoleh kemenangan.

Penekanan pada musyawarah, atau dialog, internal agama menyebabkan penyempitan wawasan musyawarah menjadi eksklusif, sesuatu yang berbeda atau bahkan bertolak belakang dari landasan konsepsionalnya. Apalagi kemudian diilustrasikan dengan suasana peperangan antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain. Wawasan konsepsional dialog akan dapat ditransformasikan dengan baik melalui praksis dialog jika disertai dengan pemahaman tentang bagaimana dialog digerakkan, yaitu semacam aturan atau etika dialog. Hal ini akan berkembang lebih jauh lagi jika konteks dialog diperlebar ke wilayah agama.

²⁵PAI SMU, II, 59.

Rekonsiliasi. Rekonsiliasi secara umum diartikan sebagai upaya mengakhiri konflik atau meretas perdamaian antarpihak yang berseteru atau bertikai. Rekonsiliasi adalah langkah lebih lanjut dari dialog atau musyawarah yang menekankan kepada komitmen bersama untuk mengakhiri konflik dan membangun kembali hidup yang baru. Dalam bahasa agama, rekonsiliasi sering dikenal sebagai *isblāh*, atau perdamaian. Istilah *isblāh* inilah yang digunakan dalam buku teks. *Isblāh* ialah usaha mendamaikan antara dua orang atau lebih yang bertengkar atau bermusuhan atau mendamaikan dari hal-hal yang dapat menimbulkan permusuhan atau peperangan.²⁶

Praktek *isblāh* ini didasarkan pada wawasan normatif berupa firman Allah yang menganjurkan kepada umat muslim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai atau memeranginya kalau upaya persuasif tidak bisa dilakukan [Qs.al- Hujurât (49): 9]. Rasulullah juga pernah memberi contoh *isblāh* yaitu ketika terjadi pertikaian internal umat Islam ketika menghadapi harta rampasan perang setelah selesai Perang Badar. Ketika itu para sahabat berselisih paham mengenai pembagian harta rampasan. Melihat perselisihan itu Rasulullah mendamaikan mereka dengan cara membagi harta rampasan itu secara adil.

Isblāh juga didasarkan kepada alasan sosiologis, yaitu kesadaran yang tinggi akan kenyataan pluralisme masyarakat.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan ras dan asal keturunan yang berbeda-beda, dengan agama yang berbeda-beda dan banyak lagi perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Di dalam menghadapi kehidupan yang beraneka ragam ini kadang-kadang perlu suatu rumusan yang dapat disetujui sejumlah orang tertentu atau bahkan mungkin oleh seluruh manusia secara universal, seperti keputusan yang dikeluarkan oleh PBB. Di dalam menjalankan suatu keputusan yang dapat diikuti oleh berbagai macam kalangan yang berbeda kemampuannya, berbeda keinginannya dan berbeda latar belakangnya, jika tidak disemangati oleh jiwa perdamaian pastilah semuanya tidak akan terwujud. Oleh sebab itu jika jiwa perdamaian ini dikembangkan di semua kehidupan semangat persatuan dan kesatuan akan tegak kokoh di tengah-tengah kehidupan yang beraneka ragam ini.²⁷

Jiwa yang menginginkan perdamaian akan tumbuh di tengah kesadaran akan pentingnya kehadiran orang lain untuk saling berbagi dan melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu dalam *isblāh*, di samping memperkokoh persatuan dan kesatuan, juga menumbuhkan rasa saling

²⁶*Ibid.*, 196.

²⁷*Ibid.*, 203.

menghormati antara sesama manusia, memupuk rasa persaudaraan, dan menjalin rasa kesetiakawanan.

Meskipun pada awalnya *ishlāh* cenderung dipahami sebagai upaya perdamaian internal umat Islam, atau internal suatu kelompok, tetapi *ishlāh* juga mencakup hubungan dengan pihak lain yang menganut kepercayaan atau agama yang berbeda. Ada empat macam *ishlāh* yang disebutkan dalam buku PAI SMU, yaitu (1) *ishlāh* antara orang-orang Islam dan bukan orang-orang Islam, (2) *ishlāh* antara pemimpin dan pemberontak, (3) *ishlāh* antara suami istri, dan (4) *ishlāh* dalam urusan *mi'āmalah*.

Dimasukkannya *ishlāh* antara orang Islam dan orang bukan Islam menarik untuk dicermati. Menarik karena pengertian awal *ishlāh* memperlihatkan kecenderungan eksklusivisme, yaitu *ishlāh* internal. *Ishlāh* orang Islam dengan orang di luar Islam (kafir) pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau beserta para sahabatnya hendak menunaikan 'umrah di Makkah. Dalam buku itu dituturkan:

Setelah sampai di Hudaibiyah beliau mendengar berita bahwa orang-orang kafir Quraisy akan menghalang-halangnya. Oleh karena itu pasukan Islam segera mengucapkan sumpah setia akan membela Islam dengan sekuat tenaga. Sumpah setia itu disebut dengan Bai'atur Ridhwan. Mendengar sumpah setia itu, orang-orang kafir Quraisy merasa cemas, kalau-kalau pasukan Islam itu akan mengadakan penyerangan balasan akibat penyerangan-penyerangan mereka yang telah lalu. Orang-orang kafir Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk mengadakan perjanjian damai dengan pasukan Islam. Perjanjian damai itu disebut dengan "Perdamaian Hudaibiyah". Isi perjanjian damai itu antara lain; pasukan Islam pada waktu itu harus kembali lagi ke Madinah dan tahun depan mereka boleh ke Makkah tidak boleh lebih dari tiga hari, tidak saling menyerang selama 10 tahun, dan bila ada orang Islam yang condong memihak ke Makkah harus diperbolehkan, tetapi jika orang Makkah ada yang condong memihak Madinah harus dicegah. Isi perjanjian ini sungguh sangat berat sebelah, tetapi karena Rasulullah lebih cinta perdamaian daripada perang, maka Rasulullah pun menerimanya dengan lapang dada. Akibatnya adalah bahwa perjanjian damai itu dapat membuka mata orang-orang yang bukan Islam, betapa orang-orang Islam itu mempunyai rasa toleransi yang tinggi.²⁸

Kerukunan Umat Beragama. Ini adalah topik yang secara khusus berkaitan dengan wacana pluralisme agama. Namun demikian, topik ini tidak saja secara khusus membicarakan mengenai bagaimana seorang muslim berhubungan dengan pemeluk agama lain untuk membangun kerukunan,

²⁸*Ibid.*, 200.

tetapi juga bagaimana seorang muslim berhubungan dengan sesama muslim, dan bagaimana muslim berhubungan dengan pemerintah.

Kerukunan intern umat beragama. Sebagaimana topik-topik yang lain, topik yang khas ini juga tidak terlepas dari gambaran cara pandang umat Islam yang menekankan pentingnya komitmen internal dalam kehidupan beragama. Dengan menekankan kerukunan internal agama, maka dapat dipahami bahwa konflik agama tidak saja terjadi melalui hubungan antagonistik dengan agama lain, melainkan juga terjadi dalam dinamika yang selalu ada dalam tubuh agama.

Antara muslim yang satu dengan muslim yang lain bersaudara. Yang mengikat persaudaraan ini adalah agama. Orang yang satu agama, mempunyai Tuhan yang sama, nabi yang sama, kitab suci yang sama, dan tentulah tujuan hidupnya juga sama yaitu ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Persaudaraan yang terjalin antara sesama umat Islam ini menyangkut seluruh segi kehidupan mulai dari masalah pribadi sampai kepada masalah kemasyarakatan, masalah ekonomi, kesehatan dan bahkan sampai kepada kenegaraan. Di antara sesama muslim hendaknya saling berkasih sayang, saling membantu, saling menolong dalam menghadapi persoalan kehidupan. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban perseorangan, tetapi juga menjadi tanggungjawab bersama.²⁹

Komitmen internal ini merupakan awal dari suatu solidaritas keagamaan yang justru dikembangkan dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan eksternal termasuk tantangan yang berasal dari penganut kepercayaan lain, baik tantangan fisik maupun tantangan non-fisik. Solidaritas internal agama ini pada dasarnya telah dikembangkan sejak pertama kali Islam muncul di Arab dan berinteraksi dengan hegemoni kaum pagan Jahiliyah.

Dari sisi pemeluk suatu agama, solidaritas internal adalah hal yang sangat penting sebagai metode pertahanan diri dan sebagai bagian dari implementasi janji agama untuk membantu penegakan diri pemeluknya. Konsolidasi internal ini selalu mengkristal terutama dalam suasana kehidupan agama yang penuh dengan konflik serta dalam dinamika hubungan mayoritas-minoritas. Dengan demikian, terdapat indikasi bahwa di dalam interaksi agama selalu ada kecenderungan penguasaan satu pihak terhadap pihak lain.

Kerukunan antarumat beragama. Jika komitmen internal agama dikembangkan dalam kerangka wawasan yang sempit, tentu saja akan melahirkan dinamika hubungan antarpemeluk agama selalu dalam suasana

²⁹*Ibid.*, 207.

saling curiga dan saling memperkuat diri. Dalam konteks pluralisme tentu saja hal itu tidak kondusif bagi kerukunan. Karena itu, buku PAI SMU mencoba mengembangkan wawasan kerukunan kepada kerangka hubungan antaragama secara luas, dimulai dari menyadari bahwa dalam kondisi riil bangsa Indonesia yang hidup dalam keragaman agama diperlukan proyek kerukunan sehingga keragaman dan harmoni bisa tetap terjamin. Kenyataan sosiologis ini juga didukung oleh ajaran-ajaran normatif yang bersumber dari al-Qur'an dan peri-hidup Rasulullah.

Di dalam buku teks PAI SMU dinyatakan bahwa di dalam Islam tidak ada konsep permusuhan atau kebencian terhadap orang yang bukan beragama Islam. Islam justru berusaha untuk menegakkan kehidupan beragama di dalam suasana perdamaian, kerukunan dan saling kerjasama dengan orang-orang yang bukan beragama Islam. Hal ini telah dibuktikan oleh Rasulullah ketika beliau membentuk pemerintahan di kota Madinah. Pada waktu itu penduduk kota Madinah terdiri atas tiga golongan, yaitu golongan Islam, golongan Yahudi, dan golongan Nasrani. Beliau membentuk komitmen persamaan hak dan kemerdekaan beragama. Karena penganut agama Nasrani di Madinah pada waktu itu sedikit, maka perhatian Rasulullah banyak tercurah kepada golongan Yahudi. Beliau mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Perjanjian itu hanya dimaksudkan untuk kepentingan duniawi semata, tidak menyangkut aspek substansi agama seperti masalah akidah dan ibadah. Isi perjanjian, yang dikenal dengan *Piagam Madinah*, itu antara lain: (1) Seluruh penduduk Madinah merupakan satu kesatuan warga yang bebas berpikir dan melakukan agamanya masing-masing serta tidak boleh saling mengganggu; (2) Apabila kota Madinah diserang musuh mereka harus mempertahankannya bersama-sama; (3) Apabila salah satu golongan diserang musuh, golongan yang lain harus membantunya; (4) Jika timbul perselisihan, penyelesaiannya di bawah keadilan yang dipimpin oleh Rasulullah.

Konsep hidup berdampingan dan tidak saling bermusuhan antara umat Islam dan golongan agama lain itu juga termuat dalam al-Qur'an [Qs.al-Kâfirûn (109): 1-6] yang menyatakan bahwa masing-masing pemeluk agama menyembah Tuhannya sendiri-sendiri, tanpa harus saling dipertukarkan satu sama lain.

Gambaran toleransi Islam seperti ini juga tercermin dalam cara-cara melakukan penyiaran agama Islam. Dakwah Islam tidak boleh dilaksanakan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi harus dilakukan dengan cara halus,

bijaksana, dan menarik. Dakwah kepada orang yang bukan Islam dilakukan dengan jalan memberikan penerangan mengenai keuntungan beragama Islam, mengenai keimanan dalam Islam yang mudah dipahami, mengenai kesederhanaan kewajiban dalam mengamalkan ibadah dan *mu'amalah* keagamaan, dasar-dasar kesusilaan, yang berprinsip saling menghormati, dan sebagainya. Sikap dakwah seperti ini diajarkan oleh al-Qur'an: "Tidak ada paksaan dalam (memasuki) agama (Islam)" [Qs. al-Baqarah (2): 256].

Dengan gambaran seperti itu, jelas Islam memiliki semangat toleransi yang tinggi. Namun demikian, toleransi ini hanya terbatas pada masalah-masalah keduniaan, seperti kerjasama dalam bidang sosial budaya, ekonomi, politik, dan masalah lain yang berkaitan dengan keduniaan. Adapun yang berkaitan dengan masalah ibadah dan akidah harus sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Dalam pergaulan sehari-hari antara umat Islam dan non-Islam ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang Islam, antara lain: (1) Tidak boleh mendoakan atau memintakan ampun kepada Allah walaupun untuk orangtuanya sendiri ataupun anaknya; (2) tidak boleh mendahului memberikan salam kepada golongan bukan Islam; (3) jika ada dari golongan bukan Islam memberi salam kepada orang Islam, tidak boleh menjawab sebagaimana jawaban kepada sesama orang Islam, tetapi cukup dengan "*wa'alaikum*"; (4) jika di dalam satu majelis atau forum yang di dalamnya terdapat orang-orang Islam dan orang-orang bukan Islam, maka orang Islam disunatkan untuk memberi salam kepada mereka.

Kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Pemerintah di sini mengandung pengertian yang cukup luas, yaitu mencakup penguasa (*umara*), dan pemimpin atau tokoh agama (*ulama*). Kerukunan dalam konteks ini adalah kerukunan politis, dalam pengertian bahwa umat beragama (Islam) harus menerima dan patuh terhadap keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama keputusan itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Jika bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam tidak dibenarkan mematuinya bahkan wajib mengingatkan dan membantah perintah itu.

Kepatuhan terhadap keputusan pemerintah dimaksudkan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika situasi keamanan dan ketertiban mantap dan terkendali, pemerintah akan dapat memusatkan perhatian dan pemikiran untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat. Bahkan untuk kepentingan itu, seluruh warga negara

dituntut untuk ikut serta membantu usaha pemerintah dalam menyejahterakan rakyat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing.

Pengembangan Hubungan Kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan merupakan bagian dari ajaran sosial Islam. Sekalipun tidak secara langsung berkaitan dengan diskursus hubungan antaragama, namun wawasan tentang hubungan manusia ikut memegang peranan dan memberi warna hubungan itu. Karena bagaimanapun, aspek-aspek normatif-doktrinal atau teologi hubungan agama harus mendapatkan wadah implementasinya dalam etika-etika sosial yang dianut dan dimiliki oleh masyarakat.

Etika sosial yang diajarkan dalam pendidikan agama sebagaimana tercermin dalam buku PAI SMU adalah penjabaran dari ranah afeksi yang merupakan kelanjutan dari aspek intelektual ajaran agama. Topik-topik yang berkaitan dengan itu, seperti tanggung jawab, keadilan (PAI SMU I), kesetiakawanan (PAI SMU II), disiplin, serta sikap dan perilaku orang beriman (PAI SMU III), semuanya dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku keberagamaan dalam konteks kehidupan yang lebih realistis.

Dalam interaksi pemeluk agama yang beragam seringkali ketegangan mengambil bentuk desktruksi fisik yang berakibat retaknya masyarakat dan rusaknya harmoni komunal. Kerusakan-kerusakan yang melibatkan pemeluk agama selalu berakhir dengan kerusakan-kerusakan fisik dan psikologis. Hal ini bisa terjadi antara lain karena dalam diri manusia yang berinteraksi terdapat perbedaan dalam menghayati tanggung jawab dalam kehidupannya.

Manusia adalah makhluk sosial. Masyarakat terdiri atas pribadi-pribadi yang beragam, di antara masyarakat itu ada yang tanggungjawabnya terhadap sesama sangat kurang atau tipis. Islam mewajibkan umatnya untuk berusaha menjaga lingkungan yang aman, tenteram, dan penuh kedamaian. Setiap orang diwajibkan untuk mengatasi kemungkaran (kejahatan) yang akan merusak lingkungan sesuai dengan kemampuannya menurut tata aturan yang ada.... Dalam pergaulan kita mempunyai tanggungjawab berusaha menghilangkan kemurkaan. Tetapi agama Islam juga mengajarkan perbuatan positif, misalnya bantu-membantu dan bahu-membahu dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, serta bersikap rendah hati.³⁰

Di samping tanggung jawab, orang Islam juga dituntut untuk berbuat adil kepada orang lain, yaitu memperlakukan mereka secara benar dan layak,

³⁰*Ibid.*, I, 104-6.

memberi hak-haknya tanpa mengurangi sedikitpun. Tidak boleh menyakiti dan merugikan orang lain, baik berupa material maupun non-material.³¹

Ajaran sosial seperti ini sesungguhnya sangat ideal dan kondusif bagi pencapaian kehidupan yang harmoni di tengah keragaman masyarakat yang sangat potensial berbenturan. Akan tetapi dalam alinea-alinea sebelumnya menjadi tidak begitu berarti jika pemaknaan terhadap tanggung jawab membawa serta nilai egosentrisme, yaitu pementingan diri sendiri.

Agama Islam tidak membenarkan seorang berbuat yang akan mencelakakan dirinya, sekalipun mungkin berguna bagi orang lain. Agama Islam tidak membenarkan seseorang berbuat yang tampaknya baik/terpuji tetapi kemungkinan sekali berpengaruh buruk bagi dirinya.... Seorang mukmin diharuskan lebih mengutamakan diri sendiri dahulu untuk kebajikannya di dunia sehingga selamat dari marabahaya, lebih-lebih marabahaya di akhirat yang berupa ancaman neraka.³²

Egosentrisme tampaknya diakui sebagai suatu kecenderungan yang selalu ada dalam kehidupan berkelompok dan bermasyarakat. Sesuai dengan naluriah kemanusiaan, tiap anggota masyarakat ingin lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Setiap pribadi dan kelompok akan membanggakan diri pribadi dan kelompoknya masing-masing.³³ Dengan kenyataan seperti ini, kehidupan masyarakat sebenarnya sangat rentan dengan konflik dan benturan. Karena itu kontrak sosial merupakan hal yang niscaya. Di dalam kontrak sosial itu setiap anggota masyarakat harus patuh dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang berlaku dan dibuat bersama. Dengan kepatuhan, perbedaan-perbedaan serta kecenderungan untuk mendominasi bisa direduksi oleh kesepakatan bersama yang sifatnya lebih tinggi, mencakup, dan mengatasi. Sebagai contoh, kesepakatan bangsa Indonesia membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan realisasi dari keinginan bersama untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat dan kecenderungan untuk saling mendominasi sebagai konsekuensi dari perbedaan itu. Dengan NKRI, perbedaan-perbedaan itu lebur dan masyarakat hidup dalam disiplin memegang kesepakatan bersama.

³¹*Ibid.*, 171.

³²*Ibid.*, 101.

³³*Ibid.*, III, 33.

Implikasi Materi Pendidikan Agama Islam

Dengan komposisi materi sebagaimana tergambar di atas, dapat dikatakan bahwa pembentukan dan pengembangan wawasan pluralisme belum menjadi perhatian yang serius dari negara melalui Departemen Agama. Kecenderungan dominasi fiqh di dalam materi buku teks, bisa melahirkan cara pandang keagamaan yang formalistik dan serba hitam putih. Hal ini jelas tidak akan memberi stimulasi bagi pengembangan perilaku keagamaan yang kondusif dan produktif di tengah dinamika keragaman agama di negeri ini. Di samping itu, dominasi aspek fiqh dalam buku teks bisa memberi gambaran seolah-olah agama identik dengan aturan-aturan normatif *fiqhiyah*. Dengan demikian, jika fiqh diyakini sebagai formulasi ajaran agama yang bersifat *zamkani* (terikat dengan zaman dan tempat), maka agama juga diyakini demikian sehingga nilai-nilai universalnya menjadi kabur. Nilai-nilai universal agama tidak banyak dikandung oleh formula fiqh, melainkan terutama dikandung oleh ajaran-ajaran etis (akhlak pribadi dan sosial). Kalau fiqh adalah kepastian, maka ajaran etis berfungsi sebagai landasan bagi transformasi kehidupan ke arah yang kondusif bagi tuntutan zaman.

Jika ada wawasan pluralisme di dalamnya, maka wawasan itu masih terbatas pada penegasan pluralisme internal yang ada dalam suatu agama (Islam) serta penanaman komitmen keagamaan yang bersifat internal. Apa yang dipahami sebagai keragaman oleh buku teks PAI SMU tidak lain adalah keragaman asal-usul, bahasa, etnis, sekte, tradisi, dan sebagainya, tanpa termasuk keragaman agama. Pluralisme dalam pandangan ini memiliki cakupan yang sempit, terbatas pada dimensi keragaman yang dimiliki satu agama. Hal ini bukan saja tidak memberi pengaruh positif bagi interaksi para pemeluk agama-agama di Indonesia, melainkan juga bisa berakibat kepada munculnya pandangan-pandangan yang sempit, diskriminatif, bahkan kecurigaan terhadap agama lain.

Fanatisme Agama. Klaim kebenaran, seperti yang digambarkan dalam buku teks PAI SMU, mempunyai dua sisi. Sisi pertama mengandung nilai sebagai pembentuk dan penguat komitmen keagamaan di kalangan penganut agama. Dengan adanya klaim kebenaran yang dikandung oleh suatu agama, pemeluk agama akan mendapatkan kemantapan iman di dalam memeluk agama. Klaim kebenaran dalam hal ini adalah semacam 'energi batin' yang memungkinkan suatu agama tetap bertahan hidup dalam hati pemeluknya. Tanpa klaim kebenaran, agama akan kehilangan peran terbesarnya bagi umat

yaitu sebagai pemberi kepastian. Klaim kebenaran adalah hal yang mutlak dalam agama, dan karena itu ia sangat positif bagi konteks keagamaan secara internal dan personal.

Di sisi lain, dalam konteks interaksi antaragama, klaim kebenaran menyimpan potensi konflik yang sangat kental terutama jika klaim itu dihadapkan kepada klaim kebenaran lain yang dikandung oleh agama yang lain. Misalnya, klaim pemeluk Islam bahwa “agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam” pasti berlawanan secara diametral dengan klaim pemeluk agama Katolik bahwa “tidak ada kebenaran/keselamatan di luar gereja”. Jika klaim-klaim itu tidak dipahami dimensi hermeneutis dan historisnya, tentu saja menimbulkan kecenderungan sikap keagamaan yang menang-menangan, saling mengklaim, dan saling menafikan satu sama lain.

Dengan adanya dua sisi klaim yang saling bertentangan itu, tidak berarti klaim-klaim itu bisa begitu saja direduksi sebagaimana ia juga tidak bisa dipertegas tanpa penjelasan hermeneutis dan historis yang memadai. Reduksi klaim kebenaran hanya akan melahirkan persoalan baru dalam agama, misalnya berupa desakralisasi dan disfungsi agama, dan justru akan membangkitkan gejala eksistensial pemeluk agama. Pada tahapan proses menuju kedewasaan, gejala eksistensial seringkali mengejawantah dalam bentuk pergolakan-pergolakan pemikiran atau bahkan konflik terbuka. Demikian juga halnya dengan mempertegas klaim kebenaran, bisa memunculkan konflik yang lebih runcing.

Jika demikian halnya, maka klaim kebenaran tidak bisa diwacanakan untuk dimatikan atau dihidupkan. Yang relevan adalah dikelola melalui argumentasi hermeneutika dan dialektika historis. Tujuannya bukan berhenti kepada pencarian kebenaran yang paling benar, melainkan kepada penemuan modus bagi transformasi pemahaman atas kebenaran itu sehingga sama-sama bermanfaat bagi harmonisasi hubungan antarpemeluk kebenaran. Salah satu contoh pengelolaan klaim itu ialah pencarian pemahaman kreatif atas konsep-konsep agama yang dianggap strategis dan fundamental sebagaimana dilakukan oleh kalangan cendekiawan agama. Farid Esack³⁴ misalnya, memberi elaborasi bahwa yang dimaksud dengan “Islam” dalam al-Qur’an Surat Âli ‘Imrân (3): 19, adalah Islam dalam pengertian kata kerja, dan bukan Islam dalam pengertian kata benda. Sebagai kata benda, Islam adalah Tuhan itu sendiri, adalah agama (*religion*), adalah fiqh, Islam adalah tujuan. Jika Islam

³⁴Lengkapannya lihat Farid Esack, *Qur’an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression* (Oxford: Oneworld Publication, 1999), 126-33.

‘didefinisikan’ sebagai kata benda, akan menyebabkan rigiditas Islam sebagai agama yang formalistik. Karena itu, jika Islam ingin memberikan andil dalam dialektika kehidupan, maka Islam harus ‘dimaknai’ sebagai kata kerja. Sebagai kata kerja yang memiliki peluang untuk berdialektika terus-menerus, Islam adalah suatu proses menuju Tuhan, adalah proses menjadi beragama (*religious*), adalah proses dialektika wahyu dengan kehidupan. Dengan corak seperti ini Islam memiliki horison luas yang memungkinkan ia bisa menembus sekat-sekat klaim keagamaan yang ada.

Diskriminasi. Minimnya pengetahuan akan agama lain di satu sisi dan penekanan terhadap pembentukan pemahaman dan komitmen internal di lain sisi akan menimbulkan cara pandang yang keliru terhadap fenomena agama lain. Cara pandang yang keliru itu bisa berbentuk apologi, a-priori, diskriminatif, standar ganda, atau curiga. Pandangan semacam itu juga bisa bermula dari cara distorsif dalam memahami berbagai macam doktrin keagamaan. Wilayah itu biasanya berhubungan erat dengan doktrin ketuhanan, kenabian, dan kitab suci, di samping persoalan malaikat, surga, neraka, dan hal-hal ghaib lainnya. Keberadaan doktrin tersebut umumnya dipakai sebagai orientasi ataupun alasan untuk saling mengklaim antarkelompok.

Keyakinan dan komitmen seseorang terhadap agamanya tidak boleh menghalangi sikap kritis dalam/ketika memandang agama lain. Karena klaim kebenaran umumnya juga terlahir dari sikap yang demikian – di samping karena keyakinan terhadap hasil interpretasi – ia memerlukan pen-*tadbîr*-an. Jangan karena kehendak loyalitas terhadap agama sendiri, hasil interpretasi tertentu dipegangi sebagai mutlak benar. Apalagi klaim untuk memposisikan bahwa hanya agamanyalah yang paling benar, sistem pengujiannya hanya dilakukan melalui bentuk-bentuk apologi. Apologi itu umumnya mengenai persoalan keabsahan Tuhan, Nabi, dan Kitab Suci. Misalnya, (1) sah tidaknya ‘sesuatu’ baik yang abstrak maupun yang tampak nyata disebut sebagai Tuhan; (2) sah tidaknya seseorang diakui sebagai Nabi atau Rasul; dan (3) sah tidaknya seperangkat ajaran moral itu disebut kitab suci.

Klaim keabsahan terhadap persoalan-persoalan itu pun pada masing-masing pemeluk agama, umumnya menggunakan standar ganda. Para pemeluk agama melihat agamanya sendiri selalu benar, sementara ketika melihat agama lain tidaklah demikian. Dengan kata lain, standar yang dipakai dalam melihat kebenaran agama lain selalu berubah sesuai kepentingan dan

“selera”-nya sendiri. Masing-masing pemeluk agama cenderung melihat kebenaran agama tertentu melalui kacamata mereka sendiri.

Pandangan seperti itu dapat mempengaruhi hubungan antariman – termasuk antaraliran – menjadi tidak harmonis. Intensitas klaim terhadap agama yang dipeluknya sebagai paling benar menjadi standar nilai dalam relasi sosial. Padahal, nilai-nilai yang menjadi patokan normatif dalam hubungan sosial tidak dapat hanya mengacu kepada satu nilai dalam agama tertentu. Demikian pula, untuk mencapai harmonitas dalam masyarakat majemuk tentunya tidak mungkin dapat hanya mensahkan nilai agama tertentu sebagai standar kehidupan sosial.

Konflik Atas Nama Agama. Konflik bisa ditimbulkan oleh agama kalau doktrin agama mengeras, yakni mengkristalnya perasaan dan sikap eksklusif. Sikap ini mengkondisikan para pemeluk agama mengklaim dirinya paling benar. Bentuk keberagaman semacam ini potensial membawa konflik kepada agama lain. Apalagi, sikap eksklusif itu dibenarkan dengan klaim bahwa hanya agama yang dipeluknya yang paling benar, sementara agama lain adalah “jalan yang salah yang membawa pengikutnya kepada kesesatan” – seperti dirumuskan oleh beberapa teolog. Di samping itu, setiap penganut agama biasanya cenderung membuat standar ganda dalam melihat agama lain. Dalam menilai agama sendiri, biasanya ia memakai standar bahwa agamanyalah yang paling benar menurut standar ideal-normatifnya sendiri, sementara dalam melihat agama lain, selalu dilihatnya ada sesuatu yang tidak ideal. Standar ganda ini juga sering digunakan untuk menegaskan secara teologis bahwa agama sendiri selalu bersifat konsisten, tanpa pertentangan atau kesalahan sama sekali, asli dari Tuhan, sementara agama lain banyak sekali kontradiksi, inkonsisten dan merupakan buatan manusia.

Melihat persoalan di atas, tampak jelas bahwa dalam situasi ekstrem, agama bisa menjadi pendorong terjadinya konflik. Sikap keagamaan yang eksklusif ini telah mewarnai sejarah umat manusia selama ini, dan agama yang kebetulan berkuasa atau mayoritas akan menindas agama lain yang kebetulan minoritas. Konsep-konsep keagamaan pun kemudian dikembangkan untuk membenarkan tindakan penguasaan terhadap agama lain. Pandangan semacam ini, misalnya, sangat disadari oleh para pemikir, misalnya Abdullahi an-Naim, seorang pemikir liberal Sudan. Menurutnya, reformasi syari’ah pun tak mampu menjawab kebuntuan metodologis untuk memecahkan paradoks yang selama ini melekat dalam fiqh yang diskriminatif. Karena itu, isu-isu penting untuk masa depan bagi

kemanusiaan, seperti demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, dan perdamaian dunia, tak terjamah oleh Islam. Umat Islam kontemporer lalu menghadapi dilematis. Ketaatan terhadap rumusan baku fiqh membawa mereka pada absolutisme internal. Adakah “jalan kebebasan bagi muslim-sekarang dan masa depan untuk melampaui dilema itu. Dapatkah dibangun lagi dasar-dasar teoretik-ijtihad bagi syari’at demokrasi?”³⁵

Setiap agama sebenarnya menghadapi masalah dilematis itu. Agama Kristen masih terus bergelut dengan doktrin keagamaan seperti *extra ecclesiam nulla salus* (tidak ada keselamatan di luar gereja), walaupun sekarang sudah ada Konsili Vatikan II. Dalam Islam, walaupun ada konsep *abl al-Kitâb*, tetapi banyak orang Islam yang memahaminya secara eksklusif, yang mengklaim bahwa pada dasarnya tidak ada keselamatan di luar agama Islam. Perang lisan melalui perkataan seperti kafir, musyrik, munafik, melabeli agama sebagai pendorong konflik.

Sikap keberagamaan yang eksklusif memang mendorong terjadinya sikap-sikap ekstrem seperti itu. Studi sosiologis keagamaan dewasa ini telah memperlihatkan tegas tentang segi-segi ekstrem pertumbuhan corak keberagamaan yang bersifat kultus dan fundamentalis, yang pada dasarnya berakar dari sikap yang menganggap diri sendiri paling benar. Itu sebabnya, pandangan keagamaan yang terbuka, toleran dan penuh dengan kelapangan dada, yang dalam agama Islam diistilahkan dengan keberagamaan yang *hanîf* adalah sesuatu yang sangat penting. Pandangan ini perlu disosialisasikan kepada para pemeluk agama di tengah banyak kalangan yang cenderung menafsirkan secara eksklusif, karena menganggap dirinya benar sendiri.

Oleh karena itu, peran pendidikan agama dalam membentuk sikap pluralisme yang mengakui bahwa agama lain juga sama-sama sah dan mempunyai nilai kebenaran merupakan suatu keharusan. Maraknya gejala klaim kebenaran dapat berakibat pada terjadinya konflik secara sangat mengerikan. Bahayanya, agama dijadikan justifikasi untuk membenarkan berbagai perbuatan sadis dalam konflik terbuka.

Peran sosialisasi agama dalam membentuk sikap pluralis tidak dapat hanya mengandalkan bentuk, melainkan esensi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pluralisme di sini bukan hanya sekedar mengatur kehidupan beragama – seperti Orde Baru telah melakukannya dengan buah problem SARA –,

³⁵Budhy Munawar-Rachman, “Filsafat Perennial dan Masalah Klaim Kebenaran,” Makalah, 28 Pebruari 1999, 4.

akan tetapi memberikan ruang sosial dan politik secara terbuka bagi segala hal yang terkait dengannya. Atau istilah teknisnya, pluralisme bukan hanya masalah prosedural dan dipahami sebagai kenyataan yang tak bisa ditolak bahwa rakyat Indonesia adalah bangsa yang majemuk, melainkan perlu pemahaman lebih mendalam tentang situasi dengan mengakomodasi berbagai persoalan yang melingkupinya.

Dalam konteks peranan agama, pluralisme bukan berarti suatu sikap basa-basi pergaulan sosial, tetapi harus berangkat dari ajaran agama dan dari teologi baru. Inilah perlunya membangun suatu teologi pluralis, bahkan lebih dari itu, suatu teologi agama-agama, suatu paham teologi baru yang memberi tempat bagi keabsahan agama lain. Hal itu dengan meyakini bahwa di luar agama yang diyakini pada dasarnya terdapat kebenaran yang sama, walaupun masing-masing agama mempunyai jalan atau tata cara yang berbeda. Islam menyebut perbedaan itu hanyalah terletak pada segi *syar'ah* (jalan) dan *manhaj* (metode) saja yang kesemuanya mengacu kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah SWT. Sebuah paham yang mengajak umat beragama kepada *kalimatun sawa'* (titik temu) pada Tuhan, untuk akhirnya sama-sama mengejar kebaikan.

Dengan begitu, memang tampaknya sikap pluralis adalah jalan yang paling menantang dewasa ini, di tengah pilihan-pilihan sikap eksklusif, tertutup, bahkan fanatik, dalam melihat hubungan antaragama. Dalam bahasa agama, pluralisme itu bahkan merupakan ketentuan Tuhan agar manusia saling mengenal, saling memperkaya sebagai suatu kesatuan umat manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an [Qs. al- Hujurât (49): 13] "Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal".

Pluralisme bukan berarti paham yang hendak menyeragamkan keanekaan, paham ini justru menjunjung tinggi keragaman dan menghargai perbedaan. Titik temu pluralisme bukan pada bentuk peleburan untuk manunggal, akan tetapi pada sikap toleransi terhadap keragaman itu sendiri. Inilah peranan pendidikan agama yang perlu dikedepankan, kini dan di masa depan, di samping peran-peran lain dalam meningkatkan kualitas keberagaman para pemeluk agama.●